



Dumai
كوت دوماي | Kota Idaman

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Jujur Berkeadilan

**#bangga
melayani
bangsa**

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025



bappeda_kotadumai



Bappeda Dumai



bappeda.dumaikota.go.id

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA DUMAI**



PEMERINTAH KOTA DUMAI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jl. Tuanku Tambusai-Bagan Besar Telp. (0765) 440414 Fax. 440415
DUMAI

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA DUMAI

NOMOR 26 BAPPEDA TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2025

KEPALA BAPPEDA,

- Menimbang :
- a. bahwa berkenaan dengan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Bappeda Kota Dumai Tahun 2025, perlu dibentuk Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kota Dumai Tahun 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Bappeda tentang Pembentukan Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3829);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

- Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 1 Seri E);
 8. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);
 9. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 13 Seri D);
 10. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 ;
 11. Peraturan Walikota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 1 Seri E);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2025

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Menyusun jadwal kerja kegiatan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kota Dumai Tahun 2025 sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Mengkoordinasikan dengan pihak terkait serta menghimpun bahan-bahan dan data guna penyusunan Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kota Dumai Tahun 2025;
3. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Perubahan Rencana Kerja yang telah disusun;
4. Menyusun Perubahan Rencana Kerja yang selaras dengan rancangan Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2025;

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 4 Maret 2025

a.n WALIKOTA
KEPALA,



Drs. RUDHI HASNUL, M.Si
Bendahara Utama Muda (IV/c)
NIP. 19740213 199303 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KOTA
DUMAI

Nomor : 24 TAHUN 2025

Tanggal : 4 Maret 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Drs. BUDHI HASNUL, M.Si	Penanggung Jawab
2.	MUNADI AHMADI, ST, M.Sc, M.Eng	Ketua
3.	HUMANDA DWIPA PUTRA, SH	Anggota
4.	ARIKE TRESMITA, S.Pi, M.Si	Anggota
5.	INSANI TAQWA SAILI, ST	Anggota
6.	WAN DODI IHSAN, M.A.P	Anggota
7.	WINDY SYAMSUL, ST, M.Si	Anggota
8.	VERONIKA YURIKE MINCI, SE	Anggota

a.n WALIKOTA
KEPALA,



Drs. BUDHI HASNUL, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19740213 199303 1 002

Kata Pengantar

Bismillahirrohmanirrohim,

Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahuwata'ala, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Dumai Tahun 2025 ini dapat disusun dengan baik dan tepat waktu. Dokumen ini disusun sebagai acuan dalam perencanaan kegiatan di BAPPEDA Kota Dumai pada Tahun 2025.


Perubahan Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA Kota Dumai Tahun 2025 ini disusun mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dibidang perencanaan pembangunan, capaian pelayanan Bappeda tahun 2025 sampai dengan triwulan I, tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah Bappeda, strategi dan arah kebijakan jangka menengah dalam mencapai tolok ukur keberhasilan pelayanan Bappeda, serta program dan kegiatan prioritas untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Dumai Tahun 2025 ini selaras dengan Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2025, dalam rangka pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Bappeda serta Misi keempat RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 yaitu "Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik" khususnya dibidang perencanaan pembangunan daerah.



Kepada pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kinerja (Renja) BAPPEDA Kota Dumai Tahun 2025 ini kami ucapkan terima kasih atas bantuan dan koordinasinya sehingga kita dapat menyelesaikan penyusunan dokumen ini dengan baik dan tepat waktu.

Dumai, Juli 2025
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai
KEPALA


Drs. BUDHI HASNUL, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740213 199303 1 002



Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI RENJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025	9
2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD sampai dengan Triwulan I (Tahun 2025)	9
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan OPD	18
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	19
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	22
BAB IV PENUTUP	32

LAMPIRAN



Daftar Tabel

Tabel 2.1.	Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD Tahun Berjalan (Tahun 2025) sampai dengan Triwulan I	10
Tabel 2.2.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai	17
Tabel 3.1.	Rincian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Target dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2024	23



Daftar Gambar

Gambar 1.1.	Diagram Alir Penyusunan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja OPD	2
--------------------	---	----------





Dumai
كوت دوماي | Kota Idaman



BABI PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

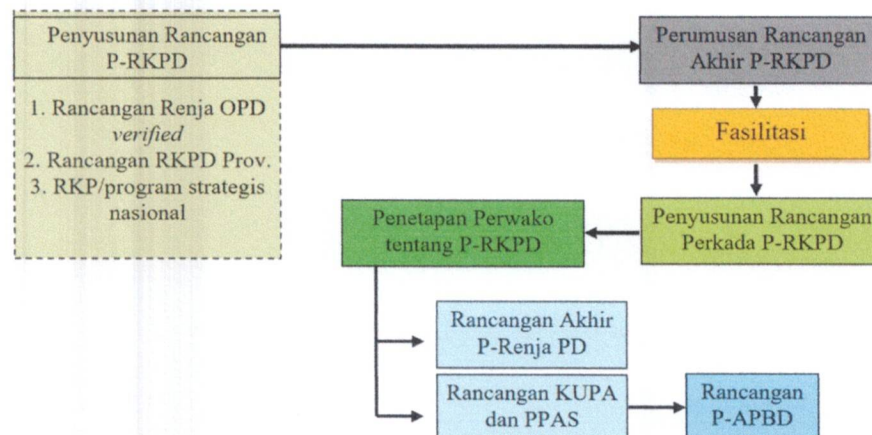
1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kinerja (Renja) merupakan dokumen perubahan perencanaan kerja sebuah Perangkat Daerah dalam tahun anggaran berjalan. Rencana kerja Perubahan disusun berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi suatu Perangkat Daerah, disamping juga berpedoman pada Rencana Strategis, RPJMD dan RPJPD yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa *output* dan *outcome* yang ingin diwujudkan oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah pada 1 (satu) tahun tertentu.

Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 343 Ayat (1) menyebutkan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi: 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas Pembangunan Daerah, Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau 2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Tahapan dan tata cara Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Dumai Tahun 2025 berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 360-361 harus menyesuaikan dengan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2025, hasil pengendalian pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I serta Perubahan Renstra Bappeda Kota Dumai Tahun 2021-2026. Selanjutnya Perubahan Renja Bappeda Kota Dumai ini dijadikan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-P) dan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P), Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Bappeda Kota Dumai Tahun 2025 yang kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan melalui penetapan APBD Perubahan (APBD-P). Proses Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja sebagaimana dilihat pada gambar 1.1. berikut.



Gambar 1.1. Diagram Alir Penyusunan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja OPD

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 224,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) serta dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5887) diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

- dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
 13. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 2 Seri A);
 14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);
 15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 1 Seri E);
 16. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 13 Seri D);
 17. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 22 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2025 Nomor 13 Seri D);
 18. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai

Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 9 Seri A);

19. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 1 seri E).
20. Peraturan Walikota Dumai Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2025 Nomor 16 seri D).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renja Bappeda Kota Dumai Tahun 2025 adalah memberikan arah bagi sekretariat dan bidang-bidang di Bappeda Kota Dumai dalam pencapaian program/kegiatan/sub-kegiatan Bappeda Kota Dumai tahun 2025 sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi yang diamanatkan.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Renja Bappeda Kota Dumai Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan kerja Bappeda Kota Dumai pada tahun 2025;
2. Menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Bappeda Kota Dumai tahun 2025;
3. Sebagai salah satu dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen Perubahan Renstra Bappeda Kota Dumai serta Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026;
4. Sebagai dasar/acuan untuk menyusun Perubahan RKA Bappeda Kota Dumai tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Renja Bappeda Kota Dumai Tahun 2025 terdiri dari 4 (empat) bab sebagai berikut:

Bab. I Pendahuluan;

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Perubahan Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang;

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja OPD, proses penyusunan Perubahan Renja OPD, keterkaitan antara Perubahan Renja OPD dengan dokumen Perubahan RKPd, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Perubahan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum;

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang OPD, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan;

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja OPD.

1.4. Sistematika Penulisan;

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab. II Evaluasi Renja OPD Sampai Dengan Triwulan I (Tahun Berjalan (2025));

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD sampai dengan Triwulan I (Tahun Berjalan);

Menyajikan Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun berjalan OPD sampai dengan semester satu (1) atau Triwulan II. Jika pada saat penyusunan Rancangan Renja Perubahan OPD, Realisasi Renja tahun berjalan belum sampai dengan triwulan I, maka Realisasi Renja yang digunakan adalah Realisasi sampai dengan bulan penyusunan Rancangan Renja Perubahan. Penyajian data

rekapitulasi berupa Tabel. 2.1 dan narasi kesimpulan dari data pada Tabel.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD;

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika OPD yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap OPD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan OPD yang bersangkutan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD;

Berisikan uraian tentang:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/ internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Bab. III Rencana Kerja dan Pendanaan

Pada bab ini menyajikan tentang Rencana Kerja Program dan Kegiatan OPD serta pendanaannya pada perubahan Rencana Kerja tahun tersebut. Pada bab ini juga dijabarkan Rekapitulasi Perubahan Renja dan Pendanaan Perangkat Daerah berupa tabel.

BAB. IV Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa:

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan,
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan, serta
3. Rencana tindak lanjut; Berisi tindak lanjut dari penyusunan dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renja Atau Renja Perubahan OPD dan harapan dari disusunnya dokumen ini.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama OPD dan nama dan tanda tangan kepala OPD, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.



Dumai
كوت دوماي | Kota Idaman



BAB II

EVALUASI RENJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025



BAB II

EVALUASI RENJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda sampai dengan Triwulan-I (Tahun 2025)

Dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja) Bappeda Tahun 2025 terdapat 2 program prioritas dengan 7 kegiatan dan 35 sub kegiatan serta 1 program penunjang urusan pemerintahan dengan 8 kegiatan dan 32 sub kegiatan sedangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Tahun 2025 terdapat 2 program prioritas dengan 7 kegiatan dan 32 sub kegiatan serta 1 program penunjang urusan pemerintahan dengan 7 kegiatan dan 26 sub kegiatan.

Dengan adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 maka perlu dilakukan pergeseran serta pengurangan untuk beberapa item belanja tertentu yang terdapat dalam Dokumen APBD Kota Dumai Tahun 2025. Demikian juga dengan adanya Tunda Bayar untuk beberapa jenis belanja yang belum dibayarkan pada pelaksanaan anggaran tahun 2024, maka perlu dianggarkan kembali belanja tersebut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Tahun 2025.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda tersebut mengacu pada program/kegiatan/sub kegiatan yang ada pada dokumen Rencana Kerja (Renja) Bappeda Tahun 2025, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Tahun 2025 yang dirubah dengan Dokumen Pergeseran Anggaran terakhir, serta laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Triwulan I Bappeda Tahun 2025, yang dituangkan pada Tabel 2.1. dibawah ini.

Bab II Evaluasi Renja Opd Sampai Dengan Triwulan II (Tahun Berjalan)

Tabel 2.1. Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD Tahun Berjalan (Tahun 2025) sampai dengan Triwulan I

Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Realisasi Capaian s.d. Triwulan I (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target		Keterangan
			Pada Dokumen Renja Tahun Berjalan (2025)	Pada Dokumen Anggaran (DPA) Tahun Berjalan (2025)/DPA Pergeseran		Terhadap Dokumen Renja Tahun Berjalan (2025)	Terhadap Dokumen Anggaran (DPA) Tahun Berjalan (2025)	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA							
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan.	10 Dokumen/Laporan	10 Dokumen/Laporan	3 Dokumen/Laporan	30%	30%	
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	-	0%	0%	Penyusunannya sedang dilaksanakan
5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	0%	0%	
5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	0%	0%	Belum dilaksanakan karena penyesuaian dengan jadwal penyusunan masing-masing dokumen
5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	0%	0%	
5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	0%	0%	
5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	100%	
5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	50%	50%	
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	9 Laporan	9 Laporan	2,5 Laporan	27,78%	27,78%	
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang	74 Orang	3,21 Orang	10,19%	10,19%	Gaji dan tunjangan yang disediakan pada DPA Pergeseran terakhir adalah untuk PNS, CPNS dan calon PPPK
5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	0,5 Laporan	50%	50%	Laporan Keuangan Unaudited telah selesai penyusunannya, sedangkan untuk Laporan Keuangan Audited masih menunggu hasil akhir pemeriksaan oleh BPK RI

Bab II Evaluasi Renja Opd Sampai Dengan Triwulan II (Tahun Berjalan)

Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Realisasi Capaian s.d. Triwulan I (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target		Keterangan
			Pada Dokumen Renja Tahun Berjalan (2025)	Pada Dokumen Anggaran (DPA) Tahun Berjalan (2025)/DPA Pergeseran		Terhadap Dokumen Renja Tahun Berjalan (2025)	Terhadap Dokumen Anggaran (DPA) Tahun Berjalan (2025)	
5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	7 Laporan	7 Laporan	2 Laporan	28,57%	28,57%	
5.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	-	0%	0%	Belum dilaksanakan sesuai dengan jadwalnya
5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5 Dokumen/ Laporan	5 Dokumen/ Laporan	1,5 Dokumen/ Laporan	33,33%	16,67%	
5.01.01.2.03.0001	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50%	50%	Dokumen RKEMD untuk Tahun 2026
5.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	0,5 Laporan	25%	25%	Laporan rekonsiliasi TW I
5.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	-	0%	0%	Disusun pada akhir tahun anggaran
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah	72 Orang	20 Orang	0 Orang	0%	0%	
5.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	-	-	-	-	Tidak dianggarkan
5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	-	0%	-	
5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	-	-	-	-	Dihapuskan sesuai dengan instruksi presiden
5.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	-	-	-	-	Tidak dianggarkan
5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	-	-	-	-	Tidak dianggarkan
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	50%	50%	
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor	2 Paket	2 Paket	-	0%	0%	Belum dilaksanakan
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	-	0%	0%	mengingat kondisi keuangan daerah yang masih terbatas
5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	-	0%	0%	
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	0,04 Paket	4%	4%	Pembayaran belanja tahun 2024 (Tunda Bayar)

Bab II Evaluasi Renja Opd Sampai Dengan Triwulan II (Tahun Berjalan)

Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Realisasi Capaian s.d. Triwulan I (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target		Keterangan
			Pada Dokumen Renja Tahun Berjalan (2025)	Pada Dokumen Anggaran (DPA) Tahun Berjalan (2025)/DPA Pergeseran		Terhadap Dokumen Renja Tahun Berjalan (2025)	Terhadap Dokumen Anggaran (DPA) Tahun Berjalan (2025)	
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	-	0%	0%	
5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	0,07 Dokumen	7%	7%	Pembayaran belanja tahun 2024 (Tunda Bayar)
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	0,02 Laporan	2,04%	2,04%	
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15 Unit	-	-	0%	-	
5.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	-	-	0%	-	Tidak dianggarkan
5.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	-	-	0%	-	Tidak dianggarkan
5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	-	-	0%	-	Tidak dianggarkan
5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	11 Unit	11 Unit	110%	100%	Pembayaran belanja tahun 2024 (Tunda Bayar)
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	50%	50%	
5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	-	0%	0%	
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	0,07 Laporan	7,19%	7,19%	
5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	-	0%	0%	Tidak dilaksanakan
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	0,31 Laporan	30,74%	30,74%	
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	47 Unit	45 Unit	14,42 Unit	40,33%	40,33%	
5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	1 Unit	-	0%	0%	
5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	20 Unit	20 Unit	1,04 Unit	5,20%	5,20%	
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	24 Unit	-	0%	0%	



Bab II Evaluasi Renja Opd Sampai Dengan Triwulan II (Tahun Berjalan)

Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Realisasi Capaian s.d. Triwulan I (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target		Keterangan
			Pada Dokumen Renja Tahun Berjalan (2025)	Pada Dokumen Anggaran (DPA) Tahun Berjalan (2025)/DPA Porgeseran		Terhadap Dokumen Renja Tahun Berjalan (2025)	Terhadap Dokumen Anggaran (DPA) Tahun Berjalan (2025)	
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	100%	Pembayaran belanja tahun 2024 (Tunda Bayar)
5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	-	0%	-	Tidak dianggarkan
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan program RKPD dengan program RPJMD Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan						
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan Pembangunan daerah	10 Dokumen	8 Dokumen	6,05 Dokumen	75,27%	85,27%	
5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen	1 Dokumen	0,14 Dokumen	13,65%	13,65%	
5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	100%	100%	
5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	100%	100%	
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	2 Berita Acara	1 Berita Acara	50%	50%	
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 Dokumen	3 Dokumen	0,85 Dokumen	21,18%	21,18%	
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen data dan informasi pemerintah daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	0,02 Dokumen	1,60%	1,60%	
5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen hasil analisis data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	1 Dokumen	0,02 Dokumen	1,60%	1,60%	
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian evaluasi dan pelaporan bidang urusan perencanaan	1 Laporan	2 Laporan	0,62 Dokumen	30,99%	30,99%	
5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	2 Laporan	1,29 Dokumen	64,69%	64,69%	

Bab II Evaluasi Renja Opd Sampai Dengan Triwulan II (Tahun Berjalan)

Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Realisasi Capaian s.d. Triwulan I (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target		Keterangan
			Pada Dokumen Renja Tahun Berjalan (2025)	Pada Dokumen Anggaran (DPA) Tahun Berjalan (2025)/DPA Pergeseran		Terhadap Dokumen Berjalan (2025)	Terhadap Dokumen Anggaran (DPA) Tahun Berjalan (2025)	
5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	
5.01.02.2.04.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil pembinaan sistem infomasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	Pembayaran belanja tahun 2024 (Tunda Bayar)
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan						
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	8 Dokumen/Laporan	8 Dokumen/Laporan	1,96 Dokumen/Laporan	24,48%	24,48%	
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	0,04 Dokumen	4,50%	4,50%	
5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	-	0%	0%	
5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	0,28 Laporan	28,02%	28,02%	
5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	2 Laporan	1,44 Laporan	72,23%	72,23%	Pembayaran belanja tahun 2024 (Tunda Bayar)
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	0,15 Dokumen	15,02%	15,02%	
5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan perangkat daerah bidang Pembangunan manusia	1 Laporan	1 Laporan	-	0%	0%	

Bab II Evaluasi Renja Opd Sampai Dengan Triwulan II (Tahun Berjalan)

Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Realisasi Capaian s.d. Triwulan I (Tahun Berjalan 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target		Keterangan
			Pada Dokumen Renja Tahun Berjalan (2025)	Pada Dokumen Anggaran (DPA) Tahun Berjalan (2025)/DPA Pergeseran		Terhadap Dokumen Renja Tahun Berjalan (2025)	Terhadap Dokumen Anggaran (DPA) Tahun Berjalan (2025)	
5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	0,41	41,13%	41,13%	Pembayaran belanja tahun 2024 (Tunda Bayar)
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	0,1 Laporan	9,72%	9,72%	
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan Sumber Daya Alam (SDA)	Jumlah dokumen perencanaan bidang perekonomian dan sumber daya alam (SDA)	14 Dokumen/Laporan	14 Dokumen/Laporan	0,87 Dokumen/Laporan	10,87%	10,87%	
5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 dokumen	1 dokumen	-	0%	0%	
5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	-	36,92%	36,92%	
5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	0,6 Laporan	59,83%	59,83%	
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perencanaan	1 Laporan	2 Laporan	1,11 Laporan	55,50%	55,52%	
5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam (SDA) (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 dokumen	1 dokumen	0,29 Dokumen	7,25%	29,01%	
5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam (SDA)	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan perangkat daerah bidang SDA (Sumber Daya Alam)	1 Laporan	1 Laporan	0,24 Laporan	24,04%	24,04%	
5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam (SDA)	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Sumber Daya Alam)	1 Laporan	1 Laporan	0,59 Laporan	58,6%	58,6%	
5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam (SDA)	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan	0,25 Laporan	25,02%	25,02%	

Bab II Evaluasi Renja Opd Sampai Dengan Triwulan II (Tahun Berjalan)

Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Realisasi Capaian s.d. Triwulan I (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target		Keterangan
			Pada Dokumen Renja Tahun Berjalan (2025)	Pada Dokumen Anggaran (DPA) Tahun Berjalan (2025)/DPA Pergeseran		Terhadap Dokumen Renja Tahun Berjalan (2025)	Terhadap Dokumen Anggaran (DPA) Tahun Berjalan (2025)	
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	14 Dokumen/Laporan	12 Dokumen/Laporan	1,72 Dokumen/Laporan	21,55%	21,55%	
5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	2 Dokumen	-	0%	0%	
5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	-	0%	0%	
5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	-	0,00%	0,00%	
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	0,16 Laporan	15,74%	15,74%	
5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	4 Dokumen	0,11 Dokumen	11,22%	11,22%	
5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan	-	0%	0%	
5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan	-	0,00%	0,00%	
5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan	0,50 Laporan	49,94%	49,94%	

Berdasarkan tabel 2.1. tersebut dapat dilihat beberapa hal yang menjadi acuan untuk pengukuran kinerja Bappeda pada tahun 2025, antara lain sebagai berikut:

1. Program/kegiatan/sub kegiatan yang telah dilaksanakan/telah memenuhi target yang ditetapkan;
2. Program/kegiatan/sub kegiatan yang telah belum dilaksanakan/ belum memenuhi target yang ditetapkan; dan
3. Program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun berjalan.

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan OPD

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai bertugas menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan berhasil guna. Penetapan indikator kinerja dirumuskan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Bappeda Kota Dumai. Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Bappeda berdasarkan evaluasi terhadap indikator-indikator kinerja tersebut tersaji pada tabel 2.4. berikut:

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026	Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2025	Tahun 2026 (n+1)	
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Pemda	-	-	-	100	100	-	-	100	100	Terlampir
2	Keselarasn dokumen RPJMD Kota Dumai dengan dokumen RPJMN	-	-	-	9	9	-	-	9	9	
3	Keselarasn dokumen RRPKD Kota Dumai dengan dokumen RKP	-	-	-	13	13	-	-	13	13	
4	Kesesuaian APBD Kota Dumai membiayai program prioritas Nasional dalam RRPD	-	-	-	10	10	-	-	10	10	
5	Kesesuaian antara Isu Strategis-Target dengan Program/Kegiatan/Proyek di RPJMD Kota Dumai atau RRPD;	-	-	-	49	49	-	-	49	49	
6	Inovasi perencanaan pembangunan	-	-	-	9	9	-	-	9	9	
7	Target dan sasaran pembangunan daerah menjadi target dan sasaran OPD terkait	-	-	-	10	10	-	-	10	10	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan bahwa pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda, maka Pemerintah Kota Dumai telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Dumai merupakan salah satu badan daerah Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (BAPPEDA) adalah badan yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai masuk ke dalam klasifikasi tipe B, yang terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang.

Kemudian untuk melaksanakan amanat Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang menyebutkan bahwa ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada, maka Pemerintah Kota Dumai telah menetapkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 82 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Dumai. Menurut peraturan tersebut Bappeda dipimpin oleh seorang Kepala berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dengan berubahnya Tugas dan Fungsi Bappeda sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) atau perencanaan tahunan;
2. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan teknokratik, politik, *bottom up*, *top down* dan partisipatif;
3. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan sinergis perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan nasional, perencanaan provinsi, daerah lainnya serta perangkat daerah/unit kerja lainnya;
4. Pelaksanaan koordinasi, bimbingan dan pengendalian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan kinerja perangkat daerah;
5. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, bimbingan dan pengendalian perencanaan serta pelaporan pembangunan daerah;
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan badan;
8. Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi rencana tata ruang wilayah dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya;
9. Penyusunan rencana secara makro kawasan strategis, kawasan khusus, kawasan pertumbuhan, kawasan kumuh dan sejenisnya dalam perencanaan pembangunan daerah;
10. Perumusan penelitian, riset, kajian dan kerjasama pengembangan perencanaan pembangunan daerah;
11. Pengembangan dan penerapan teknologi informasi dalam penyusunan perencanaan, monitoring dan evaluasi serta penyebaran informasi pembangunan daerah;
12. Penyusunan profil, penyebaran informasi dan publikasi perencanaan pembangunan daerah;

13. Penyusunan Rencana induk (master plan), rencana aksi serta dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya;
14. Penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi program/kegiatan dan penganggaran badan;
15. Pelaksanaan, bimbingan, pengendalian monitoring dan evaluasi kesekretariatan meliputi urusan tata usaha, kepegawaian, perencanaan, keuangan dan aset; dan
16. Penyiapan fungsi lain yang diberikan Wali kota sesuai dengan lingkup fungsinya.

Mengacu pada berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi BappedaKota Dumai pada masa yang akan datang, maka isu-isu strategis perencanaan pembangunan daerah diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme ASN perencana untuk melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda sebagai perumus kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
2. Peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi ke arah yang lebih baik sehingga akan menghasilkan informasi dan data yang lebih akurat dan tepat yang diperlukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi;
3. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan antar bidang dan lintas sektor;
4. Peningkatan *capacity building* kelembagaan perencana Pembangunan daerah;
5. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
6. Pengembangan sistem informasi perencanaan yang transparan, akuntabel dan aksesibel.
7. Pengembangan inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah yang dapat diimplemetasikan.



Dumai
كوت دوماي | Kota Idaman



BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN



BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Perubahan Rencana Kinerja (Renja) merupakan dokumen perubahan perencanaan kerja sebuah Perangkat Daerah dalam tahun anggaran berjalan. Rencana kerja Perubahan disusun berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi suatu Perangkat Daerah, disamping juga berpedoman pada Rencana Strategis, RPJMD dan RPJPD yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa *output* dan *outcome* yang ingin diwujudkan oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah pada 1 (satu) tahun tertentu.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diuraikan bahwa pada Bab IV fokus perhatiannya adalah terkait dengan rencana kerja dan pendanaan dokumen rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2025.

Dalam Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2025 terdapat 3 (tiga) program, 15 (lima belas) kegiatan dan 72 (tujuh puluh dua) sub kegiatan, baik program, kegiatan dan sub kegiatan utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pemenuhan visi dan misi kepala daerah, maupun program, kegiatan dan sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan

daerah Kabupaten/Kota yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan dan subkegiatan.

Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program. Berikut program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Rencana Kinerja Tahun 2025 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai terdapat pada Tabel. 3.1. berikut.

Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan

Tabel 3.1.
Rincian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Target dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja (Renja)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2025

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KET		
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp.)				
			SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2025	APBD 2025 (MURNI)		PERUBAHAN RENJA 2025	BERTAMBAH/ BERKURANG
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				17.015.000.000	11.569.326.355	11.617.881.534,08	-5.397.118.465,92	
5.01	PERENCANAAN				17.015.000.000	11.569.326.355	11.617.881.534,08	-5.397.118.465,92	
5.01.01	ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan	100%	100%	11.630.000.000	7.824.529.061	8.313.143.348,08	-3.316.856.651,92	
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 Dokumen/ Laporan	15 Dokumen/ Laporan	100.000.000	64.953.676	54.500.000	-45.500.000	
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	4 Dokumen	30.000.000	5.654.558	10.000.000	-20.000.000	
5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	4.299.118	9.000.000	-9.000.000	
5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	20.000.000	10.000.000	-10.000.000	
5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	
5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	5.000.000	-5.000.000	
5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	14.000.000	14.000.000	7.000.000	-7.000.000	
5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	5 Laporan	1.000.000	1.000.000	3.500.000	2.500.000	

Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				BERTAMBAH/ BERKURANG	KET
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp.)			
			SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2025	APBD 2025 (MURNI)		
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan administrasi keuangan perangkat daerah	9 Dokumen/ Laporan	20 Dokumen/ Laporan	5.530.000.000	4.414.134.700	5.858.166.640	328.166.640
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang	74 Orang	5.500.000.000	4.384.134.700	5.843.166.640	343.166.640
5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	20.000.000	10.000.000	-10.000.000
5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran/ SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7 Laporan	18 Laporan	5.000.000	5.000.000	3.000.000	-2.000.000
5.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000	2.000.000	-3.000.000
5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5 Dokumen/ Laporan	7 Dokumen/ Laporan	10.000.000	10.000.000	4.500.000	-5.500.000
5.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000	2.000.000	1.000.000	-1.000.000
5.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	4 Laporan	3.000.000	3.000.000	1.500.000	-1.500.000
5.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000	5.000.000	2.000.000	-3.000.000
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan yang disediakan	80 Orang	1 Paket	850.000.000	320.268.000	35.904.000	-814.096.000
5.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	0 Unit	50.000.000	0	0	-50.000.000
5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	200.000.000	80.646.000	35.904.000	-164.096.000
5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	0 Orang	400.000.000	239.622.000	0	-400.000.000

Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KET
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp.)			
			SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2025	APBD 2025 (MURNI)	PERUBAHAN RENJA 2025	
5.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	0 Orang	100.000.000	0	0	-100.000.000
5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	0 Orang	100.000.000	0	0	-100.000.000
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	5 Paket	1.340.000.000	938.66.88.365	643.784.285,56	-696.215.714,44
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor	2 Paket	1 Paket	20.000.000	20.000.000	11.541.550,01	-8.458.449,99
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	250.000.000	216.172.745	165.066.335,57	-84.933.664,43
5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	20.000.000	20.000.000	28.761.900	8.761.900
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	150.000.000	150.000.000	125.150.000	-24.850.000
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	50.000.000	32.840.500	30.849.499,98	-19.150.500,02
5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	32.165.000,00	-17.835.000
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	800.000.000	449.655.120	250.250.000	-549.750.000
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	77 Unit	28 Unit	1.650.000.000	200.000.000	274.411.000	-1.375.589.000
5.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	400.000.000,	0	0	-400.000.000
5.01.01.2.07.0002	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	10 Unit	200.000.000	200.000.000	8.000.000	-192.000.000
5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	18 unit	700.000.000	0	266.411.000	-433.589.000
5.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	200.000.000	0	0	-200.000.000

Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KET	
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp.)				
			SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2025	APBD 2025 (MURNI)	PERUBAHAN RENJA 2025		BERTAMBAH/ BERKURANG
5.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	150.000.000	0	0	-150.000.000	
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan/Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	3 Laporan	1.250.000.000	1.175.144.320	1.001.404.320	-248.595.680	
5.01.01.2.08.0001	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	2.500.000	4.000.000	-6.000.000	
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	40.000.000	29.200.000	26.700.000	-13.300.000	
5.01.01.2.08.0003	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0 Laporan	50.000.000	49.000.000	0	-50.000.000	
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1.150.000.000	1.094.444.320	970.704.320	-179.295.680	
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	45 Unit	45 Unit	900.000.000	701.360.000	474.733.500	-163.796.500	
5.01.01.2.09.0001	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas abatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	50.000.000	19.000.000	19.000.000	-19.530.000	
5.01.01.2.09.0002	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	20 Unit	350.000.000	212.220.000	188.018.500	-161.981.500	
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	24 Unit	100.000.000	70.140.000	60.715.000	10.715.000	
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	200.000.000	200.000.000	200.000.000	0	

Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KET
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp.)			
			SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2025	APBD 2025 (MURNI)	PERUBAHAN RENJA 2025	
5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	200.000.000	200.000.000	7.000.000	7.000.000
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan program RKPD dengan program RPJMD Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100%	100%	1.600.000.000	1.503.680.000	1.257.589.740	-342.410.260
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan Pembangunan daerah	3 Dokumen	4 Dokumen	1.175.000.000	1.175.000.000	1.034.006.660	-140.993.340
5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	100.000.000	31.273.500	-68.726.500
5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	2 Berita Acara	75.000.000	75.000.000	17.044.000	-57.956.000
5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara	100.000.000	100.000.000	63.180.000	-36.820.000
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	2 Berita Acara	200.000.000	200.000.000	122.606.000	-77.394.000
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMMD/RKPD)	2 Dokumen	3 Dokumen	700.000.000	700.000.000	799.903.160	99.903.160
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen data dan informasi pemerintah daerah bidang perencanaan Pembangunan daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	175.000.000	174.872.000	84.541.080	-90.458.920
5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	2 Dokumen	175.000.000	174.872.000	84.541.080	-90.458.920

Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KET	
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp.)			
			SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2025	APBD 2025 (MURNI)		PERUBAHAN RENJA 2025
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian evaluasi dan pelaporan bidang urusan perencanaan	1 Dokumen	1 Laporan	150.000.000	150.000.000	135.946.000	-14.054.000
5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	1 Laporan	150.000.000	150.000.000	135.946.000	-14.054.000
5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	0 Laporan	1 Laporan	100.000.000	3.680.000	3.096.000	-96.904.000
5.01.02.2.04.0003	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	0 Laporan	1 Laporan	100.000.000	3.680.000	3.096.000	-96.904.000
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan	100%	100%	3.785.000.000	2.241.117.294	2.047.148.446	-1.737.851.554
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	8 Dokumen/Laporan	10 Dokumen/Laporan	1.200.000.000	848.399.700	802.360.850	-397.639.150
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	139.676.750	75.954.950	-124.045.050
5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	8.626.000	14.336.000	-5.664.000
5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000	12.455.185	14.615.485	-15.384.515

Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				BERTAMBAH/ BERKURANG	KET	
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp.)				
			SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2025	APBD 2025 (MURNI)			PERUBAHAN RENJA 2025
5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pemerintahan	2 Laporan	2 Laporan	300.000.000	300.000.000	439.596.300	139.596.300	
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000	130.710.122	76.034.922	-173.965.078	
5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan perangkat daerah bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000	22.545.808	9.222.058	-20.777.942	
5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	120.000.000	97.016.922	65.377.222	-54.622.778	
5.01.03.2.01.0010	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	2 Laporan	250.000.000	137.368.913	107.223.913	-142.776.087	
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen perencanaan bidang perkeonomian dan sumber daya alam (SDA)	9 Dokumen/Laporan	8 Dokumen/Laporan	1.345.000.000	698.576.500	727.049.781	-617.950.219	
5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perkeonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perkeonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000	110.620.100	53.396.54	-196.603.454	
5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perkeonomian	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan perangkat daerah bidang perkeonomian	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	13.408.900	5.940.759	-14.059.241	

Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KET	
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp.)				
			SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2025	APBD 2025 (MURNI)	PERUBAHAN RENJA 2025		BERTAMBAH/ BERKURANG
5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	1 Laporan	1 Laporan	60.000.000	24.180.000	32.151.870	-27.848.130	
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMMD pada Bidang Perencanaan	1 Laporan	1 Laporan	650.000.000	431.752.220	544.969.577	-105.030.423	
5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	47.084.700	26.268.472	-123.731.528	
5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA (Sumber Daya Alam)	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	7.234.800	6.864.800	-13.135.200	
5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Sumber Daya Alam)	1 Laporan	1 Laporan	60.000.000	25.020.000	32.001.870	-27.998.130	
5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMMD pada Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan	135.000.000	39.275.780	25.455.887	-109.544.113	
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	8 Dokumen/Laporan	8 Dokumen/Laporan	1.240.000.000	694.141.094	517.737.815	-722.262.185,	
5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000	73.852.494	37.042.369	-212.957.631	
5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000	14.683.800	6.217.461	-23.782.539	

Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KET
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp.)			
			SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2025	APBD 2025 (MURNI)	PERUBAHAN RENJA 2025	
5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	80.000.000	49.603.800	17.151.870	-62.848.130
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	350.000.000	310.285.800	295.025.716	-54.974.284
5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	68.032.244	39.052.244	-160.947.756
5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000	14.704.872	6.024.872	-23.975.128
5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000	50.831.122	37.791.122	-62.208.878
5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan	200.000.000	112.146.962	79.432.161	-120.567.839



Dumai
كوت دوماي | Kota Idaman



BAB IV

PENUTUP



BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan penjabaran pelaksanaan tahun keempat dari Perubahan Rencana Strategis Bappeda Kota Dumai Tahun 2021-2026. Dengan mengacu kepada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026 serta hasil analisis, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja dan DPA Tahun 2025,

Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsi Bappeda, Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kota Dumai Tahun 2025 ini sebagai dokumen rencana operasional Bappeda Kota Dumai pada Tahun 2025. Diharapkan dengan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan prioritas dan program/kegiatan/sub kegiatan pendukung lainnya, maka kualitas perencanaan pembangunan Kota Dumai akan semakin baik, terintegrasi disemua aspek serta lebih tepat sasaran, yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Dumai secara umum.

**Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Dumai**



Drs. BUDHI HASNUL, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19740213 199303 1 002



Dumai
كوت دوماي | Kota Idaman



LAMPIRAN



No	Bantuan	Kode	Nama Binaan, Lokasi, dan Program/Kegiatan	Tipe BIPRD (Kategori Bina Peningkatan/Program/Kegiatan)			Tipe BIPRD (Kategori Bina Peningkatan/Program/Kegiatan)			Tipe BIPRD (Kategori Bina Peningkatan/Program/Kegiatan)			Tipe BIPRD (Kategori Bina Peningkatan/Program/Kegiatan)			Perangkat Lunak dan Bahan Baku	Keterangan				
				K	Rp	%	K	Rp	%	K	Rp	%	K	Rp	%						
1	3	3	...	4					
REKAPITULASI																					
				K			Rp			%			K			Rp			%		
				10			11			12			13			14			15		
				K			Rp			%			K			Rp			%		
				16			17			18			19			20			21		
				K			Rp			%			K			Rp			%		
				22			23			24			25			26			27		
				K			Rp			%			K			Rp			%		
				28			29			30			31			32			33		
				K			Rp			%			K			Rp			%		
				34			35			36			37			38			39		
				K			Rp			%			K			Rp			%		
				40			41			42			43			44			45		
				K			Rp			%			K			Rp			%		
				46			47			48			49			50			51		
				K			Rp			%			K			Rp			%		
				52			53			54			55			56			57		
				K			Rp			%			K			Rp			%		
				58			59			60			61			62			63		
				K			Rp			%			K			Rp			%		
				64			65			66			67			68			69		
				K			Rp			%			K			Rp			%		
				70			71			72			73			74			75		
				K			Rp			%			K			Rp			%		
				76			77			78			79			80			81		
				K			Rp			%			K			Rp			%		
				82			83			84			85			86			87		
				K			Rp			%			K			Rp			%		
				88			89			90			91			92			93		
				K			Rp			%			K			Rp			%		
				94			95			96			97			98			99		
				K			Rp			%			K			Rp			%		
				100			101			102			103			104			105		
				K			Rp			%			K			Rp			%		
				106			107			108			109			110			111		
				K			Rp			%			K			Rp			%		
				112			113			114			115			116			117		
				K			Rp			%			K			Rp			%		
				118			119			120			121			122			123		
				K			Rp			%			K			Rp			%		
				124			125			126			127			128			129		
				K			Rp			%			K			Rp			%		
				130			131			132			133			134			135		
				K			Rp			%			K			Rp			%		
				136			137			138			139			140			141		
				K			Rp			%			K			Rp			%		
				142			143			144			145			146			147		
				K			Rp			%			K			Rp			%		
				148			149			150			151			152			153		
				K			Rp			%			K			Rp			%		
				154			155			156			157			158			159		
				K			Rp			%			K			Rp			%		
				160			161			162			163			164			165		
				K			Rp			%			K			Rp			%		
				166			167			168			169			170			171		
				K			Rp			%			K			Rp			%		
				172			173			174			175			176			177		
				K			Rp			%			K			Rp			%		
				178			179			180			181			182			183		
				K			Rp			%			K			Rp			%		
				184			185			186			187			188			189		
				K			Rp			%			K			Rp			%		
				190			191			192			193			194			195		
				K			Rp			%			K			Rp			%		
				196			197			198			199			200			201		
				K			Rp			%			K			Rp			%		
				202			203			204			205			206			207		
				K			Rp			%			K			Rp			%		
				208			209			210			211			212			213		
				K			Rp			%			K			Rp			%		
				214			215			216			217			218			219		
				K			Rp			%			K			Rp			%		
				220			221			222			223			224			225		
				K			Rp			%			K			Rp			%		
				226			227			228			229			230			231		
				K			Rp			%			K			Rp			%		
				232			233			234			235			236			237		
				K			Rp			%			K			Rp			%		
				238			239			240			241			242			243		
				K			Rp			%			K			Rp			%		
				244			245			246			247			248			249		
				K			Rp			%			K			Rp			%		
				250			251			252			253			254			255		
				K			Rp			%			K			Rp			%		
				256			257			258			259			260			261		
				K			Rp			%			K			Rp			%		
				262			263			264			265			266			267		
				K			Rp			%			K			Rp			%		
				268			269			270			271			272			273		
				K			Rp			%			K			Rp			%		
				274			275			276			277			278			279		
				K			Rp			%			K			Rp			%		
				280			281			282			283			284			285		
				K			Rp			%			K			Rp			%		
				286			287			288			289			290			291		
				K			Rp			%			K			Rp			%		
				292			293			294			295			296			297		
				K			Rp			%			K			Rp			%		
				298			299			300			301			302			303		
				K			Rp			%			K			Rp			%		
				304			305			306			307			308			309		
				K			Rp			%			K			Rp			%		
				310			311			312			313			314			315		
				K			Rp			%			K			Rp			%		
				316			317			318			319			320			321		
				K			Rp			%			K			Rp			%		
				322			323			324			325			326			327		
				K			Rp			%			K			Rp			%		
				328			329			330			331			332			333		
				K			Rp			%			K			Rp			%		
				334			335			336			337			338			339		
				K			Rp			%			K			Rp			%		
				340			341			342			343			344			345		
				K			Rp			%			K			Rp			%		
				346			347			348			349			350			351		
				K			Rp			%			K			Rp			%		
				352			353			354			355			356			357		
				K			Rp			%			K			Rp			%		
				358			359			360			361			362			363		
				K			Rp			%			K			Rp			%		
				364			365			366			367			368			369		
				K			Rp			%			K			Rp			%		
				370			371			372			373			374			375		
				K			Rp			%			K			Rp			%		
				376			377			378			379			380			381		
				K			Rp			%			K			Rp			%		
				382			383			384			385			386			387		
				K			Rp			%			K			Rp			%		
				388			389			390			391			392			393		
				K			Rp			%			K			Rp			%		
				394			395			396			397			398			399		
				K			Rp			%			K			Rp			%		
				400			401			402			403			404			405		
				K			Rp			%			K			Rp			%		
				406			407			408			409			410			411		
				K			Rp			%			K			Rp			%		
				412			413			414			415			416			417		
				K			Rp			%			K			Rp			%		
				418			419			420			421			422			423		
				K			Rp			%			K			Rp			%		
				424			425			426			427			428			429		
				K			Rp			%			K			Rp			%		
				430			431			432			433			434			435		
				K			Rp			%			K			Rp			%		
				436			437			438			439			440			441		
				K			Rp			%			K			Rp			%		
				442			443			444			445			446			447		
				K			Rp			%			K			Rp			%		
				448			449			450			451			452			453		
				K			Rp			%			K			Rp			%		
				454			455			456			457			458			459		
</																					

NO	KODE	NAMA KEGIATAN/UMUM PROGRAM/KELOMPOK	INDIKATOR INDIKATOR KEGIATAN/UMUM PROGRAM/KELOMPOK	TARJETA ANUR RESTRUKTURISASI/RESTRUKTURISASI	MELAKUKI KEGIATAN/UMUM PROGRAM/KELOMPOK	PROJEKSI/RESTRUKTURISASI	FAKSI INDIKATOR (RUP)		REVISI PERUBAHAN 2018	LOKASI	SUMBER DANA	MUSKIL	DASAR	REVISI/PROF/UMUM	TARJETA	FAKSI INDIKATOR (RUP)	PERAKHIRAN/UMUM				
							RUPD 2018	RUPD 2018													
1	2			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
5.07.02.2.01.0003		Adiklatas Monev/ing dan Evaluasi Peningkatan Dukumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Monev/ing dan Evaluasi Peningkatan Dukumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	22.000.000,00	6.671.000,00	14.329.000,00	-4.664.000,00	Kota Dumai, Socarum, Sistem K4D/Ches	DANA BAGI HASIL (DBH)	Monev/ing dan Evaluasi Peningkatan Dukumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PEKERJAAN/UMUM	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PEKERJAAN/UMUM	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PEKERJAAN/UMUM	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PEKERJAAN/UMUM	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PEKERJAAN/UMUM	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PEKERJAAN/UMUM
5.07.02.2.01.0004		Kontribusi Pelaksanaan Strategi dan Terasi Hasil Peningkatan Dukumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Monev/ing dan Evaluasi Peningkatan Dukumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00	438.996.320,00	139.996.320,00	Kota Dumai, Socarum, Sistem K4D/Ches	DANA BAGI HASIL (DBH)	Monev/ing dan Evaluasi Peningkatan Dukumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PEKERJAAN/UMUM	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PEKERJAAN/UMUM	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PEKERJAAN/UMUM	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PEKERJAAN/UMUM	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PEKERJAAN/UMUM	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PEKERJAAN/UMUM
5.07.02.2.01.0005		Kontribusi Pelaksanaan Strategi dan Terasi Hasil Peningkatan Dukumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Monev/ing dan Evaluasi Peningkatan Dukumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	1 Dukumen	1 Dukumen	1 Dukumen	1 Dukumen	1 Dukumen	250.000.000,00	150.751.123,20	70.034.802,00	-173.655.876,80	Kota Dumai, Socarum, Sistem K4D/Ches	DANA BAGI HASIL (DBH)	Monev/ing dan Evaluasi Peningkatan Dukumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PEKERJAAN/UMUM	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PEKERJAAN/UMUM	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PEKERJAAN/UMUM	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PEKERJAAN/UMUM	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PEKERJAAN/UMUM	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PEKERJAAN/UMUM
5.07.02.2.01.0006		Adiklatas Peningkatan Dukumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Monev/ing dan Evaluasi Peningkatan Dukumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	23.648.856,00	8.222.856,00	-26.351.144,00	Kota Dumai, Socarum, Sistem K4D/Ches	DANA BAGI HASIL (DBH)	Monev/ing dan Evaluasi Peningkatan Dukumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PEKERJAAN/UMUM	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PEKERJAAN/UMUM	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PEKERJAAN/UMUM	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PEKERJAAN/UMUM	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PEKERJAAN/UMUM	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PEKERJAAN/UMUM
5.07.02.2.01.0007		Adiklatas Monev/ing dan Evaluasi Peningkatan Dukumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Monev/ing dan Evaluasi Peningkatan Dukumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	120.000.000,00	87.018.822,00	60.377.232,00	-4.622.778,00	Kota Dumai, Socarum, Sistem K4D/Ches	DANA BAGI HASIL (DBH)	Monev/ing dan Evaluasi Peningkatan Dukumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PEKERJAAN/UMUM	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PEKERJAAN/UMUM	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PEKERJAAN/UMUM	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PEKERJAAN/UMUM	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PEKERJAAN/UMUM	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PEKERJAAN/UMUM
5.07.02.2.01.0008		Kontribusi Pelaksanaan Strategi dan Terasi Hasil Peningkatan Dukumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Monev/ing dan Evaluasi Peningkatan Dukumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	137.360.310,20	107.222.817,00	-142.779.689,20	Kota Dumai, Socarum, Sistem K4D/Ches	DANA BAGI HASIL (DBH)	Monev/ing dan Evaluasi Peningkatan Dukumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PEKERJAAN/UMUM	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PEKERJAAN/UMUM	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PEKERJAAN/UMUM	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PEKERJAAN/UMUM	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PEKERJAAN/UMUM	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PEKERJAAN/UMUM
5.07.02.2.01.0009		Kontribusi Pelaksanaan Strategi dan Terasi Hasil Peningkatan Dukumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Monev/ing dan Evaluasi Peningkatan Dukumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	8 Dukumen	8 Dukumen	8 Dukumen	8 Dukumen	8 Dukumen	1.340.000.000,00	698.674.960,00	77.748.791,00	-4.179.039,00	Kota Dumai, Socarum, Sistem K4D/Ches	DANA BAGI HASIL (DBH)	Monev/ing dan Evaluasi Peningkatan Dukumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PEKERJAAN/UMUM	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PEKERJAAN/UMUM	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PEKERJAAN/UMUM	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PEKERJAAN/UMUM	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PEKERJAAN/UMUM	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PEKERJAAN/UMUM
5.07.02.2.02.0001		Kontribusi Pelaksanaan Strategi dan Terasi Hasil Peningkatan Dukumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Monev/ing dan Evaluasi Peningkatan Dukumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	1 Dukumen	1 Dukumen	1 Dukumen	1 Dukumen	1 Dukumen	250.000.000,00	110.621.000,00	63.386.848,00	-186.633.452,00	Kota Dumai, Socarum, Sistem K4D/Ches	DANA BAGI HASIL (DBH)	Monev/ing dan Evaluasi Peningkatan Dukumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PEKERJAAN/UMUM	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PEKERJAAN/UMUM	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PEKERJAAN/UMUM	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PEKERJAAN/UMUM	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PEKERJAAN/UMUM	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PEKERJAAN/UMUM
5.07.02.2.02.0002		Monev/ing dan Evaluasi Peningkatan Dukumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Monev/ing dan Evaluasi Peningkatan Dukumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	22.000.000,00	11.428.900,00	5.840.700,00	-14.659.341,00	Kota Dumai, Socarum, Sistem K4D/Ches	DANA BAGI HASIL (DBH)	Monev/ing dan Evaluasi Peningkatan Dukumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PEKERJAAN/UMUM	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PEKERJAAN/UMUM	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PEKERJAAN/UMUM	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PEKERJAAN/UMUM	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PEKERJAAN/UMUM	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PEKERJAAN/UMUM
5.07.02.2.02.0003		Adiklatas Monev/ing dan Evaluasi Peningkatan Dukumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Monev/ing dan Evaluasi Peningkatan Dukumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	24.160.000,00	32.151.870,00	-27.840.130,00	Kota Dumai, Socarum, Sistem K4D/Ches	DANA BAGI HASIL (DBH)	Monev/ing dan Evaluasi Peningkatan Dukumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PEKERJAAN/UMUM	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PEKERJAAN/UMUM	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PEKERJAAN/UMUM	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PEKERJAAN/UMUM	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PEKERJAAN/UMUM	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PEKERJAAN/UMUM

